



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## WACANA PENGHAPUSAN SEMENTARA HET BERAS

**Sulasi Rongiyati**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[sulasi.rongiyati@dpr.go.id](mailto:sulasi.rongiyati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Harga beras terus naik menembus harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sebagaimana disampaikan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo, bahwa harga beras di tingkat konsumen per 17 September 2023 sudah melonjak 22,58% dibandingkan tahun lalu, begitu juga harga beras medium naik 23,56%. Data Panel Harga Pangan Bapanas tanggal 22 September 2023 menunjukkan rata-rata harga nasional beras medium sebesar Rp13.040/kg. Harga ini jauh melampaui HET beras medium berdasarkan zonasi. Mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, pemerintah membagi HET beras dalam tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dengan HET beras medium sebesar Rp10.900/kg sedangkan beras premium sebesar Rp13.900/kg. Zona II meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dengan HET beras medium sebesar Rp11.500/kg dan beras premium sebesar Rp14.400/kg. Zona III meliputi Maluku dan Papua dengan HET beras medium sebesar Rp11.800/kg dan HET beras premium sebesar Rp14.800/kg. Namun, fakta di lapangan, harga beras medium di zona I mencapai 13,88% di atas HET, zona II 15,05% di atas HET, dan di zona III harga beras medium mencapai 24,72% di atas HET.

Melihat kenaikan harga beras yang terus meningkat, Ombudsman Republik Indonesia dalam Siaran Pers-nya tanggal 18 September 2023 meminta pemerintah menghentikan sementara kebijakan HET beras. Hal ini dikarenakan terjadi kekhawatiran akan membuat harga beras semakin melambung di pasaran. Ombudsman merujuk pada pemberlakuan HET minyak goreng pada 2022, HET minyak goreng justru membuat minyak goreng langka di pasaran. Ombudsman juga mengusulkan kepada pemerintah untuk segera menetapkan HET gabah kering panen (GKP) sebagai pengganti HET beras untuk menghambat lonjakan harga komoditas pangan tersebut. Alasannya, salah satu penyebab lonjakan harga beras didorong oleh mahalnya harga gabah. Menurut anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, selama ini kebijakan HET beras tidak efektif untuk menstabilkan harga komoditas beras di pasar. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dari sisi pengawasan, pemerintah juga akan lebih mudah mengawasi harga gabah di tingkat penggilingan dibandingkan dengan mengawasi harga beras di tingkat pengecer.

Terkait usulan penghapusan HET beras, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa salah satu pemicu kenaikan harga beras adalah berkurangnya pasokan gabah ke penggilingan. Hal tersebut menyebabkan harga gabah terus melonjak di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Saat ini, harga rata-rata GKP nasional jauh melampaui HPP, yaitu mencapai Rp6.580 per kg, naik 15,23% secara bulanan. Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, pemerintah menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp5.000/kg. Sementara itu, HPP GKP di tingkat penggilingan harganya ditetapkan Rp5.100/kg. Namun, Arief menolak usulan penghapusan HET Beras. ini dikarenakan HET

merupakan parameter bagi pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga. Menurut Arief, tantangan utama yang harus dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga beras adalah meningkatkan produksi dan stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sependapat dengan Kepala Bapanas, Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal juga menyebutkan kenaikan harga beras saat ini murni karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut pemerintah melalui Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyalurkan bantuan pangan beras pada bulan September hingga November kepada 21,35 juta keluarga penerima bantuan. Namun, upaya tersebut belum mampu menurunkan HET beras, hanya sebatas menahan harga beras supaya tidak naik lebih tinggi.

## Atensi DPR

Wacana/usulan Ombudsman untuk penghapusan sementara HET Beras dan menggantinya dengan HET gabah menimbulkan pro dan kontra. Harga beras terus naik melampaui HET yang ditetapkan pemerintah, salah satunya dipicu kurangnya pasokan gabah. Data Bapanas, per 22 September 2023 harga rata-rata nasional beras medium sebesar Rp13.040/kg, jauh melampaui HET beras medium. Sementara itu, harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) nasional mencapai Rp6.580/kg. Harga ini jauh dari harga pembelian pemerintah (HPP), yaitu Rp5000/kg. Upaya pemerintah mengatasi lonjakan harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras, belum mampu menurunkan HET beras.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI perlu memastikan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras dilakukan tepat sasaran. Upaya menambah impor beras juga perlu didorong untuk mengamankan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pemerintah dapat menempuh upaya barter pangan apabila mengalami kesulitan impor beras dari negara lain, sebagai tindakan negara-negara untuk mengamankan cadangan pangannya.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 20 September 2023;  
cnbcindonesia.com, 18 September 2023;  
*Kompas*, 23 September 2023;  
*Kontan*, 22 September 2023;  
*Media Indonesia*, 19 September 2023.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023